



## Sistem Informasi e-Verifikasi Keuangan Pada Instansi Pemerintah Daerah

Sabto Kironowati<sup>1</sup>, Tazkiyah Herdi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana

<sup>1</sup>41817310021@mercubuana.ac.id, <sup>2</sup>tazkiyah.herdi@mercubuana.ac.id

### Abstract

*The development of e-government has become the focus of regional government nowadays. The move is meant to push the acceleration of an efficient and transparent governance particularly in public service improvement. One of the indicators of the success of transparency in financial management of local government is "unqualified opinion" by the Supreme Audit Agency (BPK). However, there are still some problems in verification stage such as error in data input, wrong budget usage and document of expenditure report are not in line with the prevailing laws and regulations. In the previous researches it was stated that e-government has emerged as a solution for the financial management, but yet to cover the verification process. The effort to solve the problem is by creating an IT-based e-verification information system using prototype development system method for the management of procurement verification of local government. The system is developed to verify the procurement of goods and services as stated in the procurement list (PaBJ) of budget implementation (DPA) as the reference for the treasury department for budget disbursement.*

*Keywords: information system development, verification activities, verification of procurement of goods and service.*

### Abstrak

Perkembangan *e-government* saat ini telah menjadi fokus dari pemerintah daerah, hal ini untuk mendorong percepatan dalam pengelolaan pemerintah yang efisien dan transparan dalam peningkatan pelayanan publik. Salah satu indikator keberhasilan transparansi penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah adalah dengan penetapan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, dalam pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dalam hal verifikasi, masih mendapat banyak kendala seperti kesalahan input data, kesalahalasan penggunaan anggaran, dan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penelitian sebelumnya, *e-government* telah hadir untuk menjadi solusi pengelolaan keuangan, tetapi belum mencakup proses verifikasi keuangan. Upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat sistem informasi e-verifikasi keuangan berbasis teknologi informasi dengan metode pengembangan sistem *Prototyping* untuk mengelola verifikasi belanja keuangan daerah. Sistem dikembangkan untuk verifikasi membuat verifikasi kegiatan dan pengadaan barang jasa sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan daftar Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yang menjadi acuan bendahara untuk melakukan pencairan anggaran.

Kata kunci: pengembangan sistem informasi, verifikasi kegiatan, dan verifikasi pengadaan barang dan jasa.

© 2019 Jurnal RESTI

### 1. Pendahuluan

Perkembangan *e-government* saat ini menjadi fokus dari pemerintah daerah untuk mendorong percepatan dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan transparan dalam peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional dengan berpedoman pada

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*[1].

Lebih khusus, *e-government* juga diterapkan di dalam proses penatausahaan keuangan daerah yang memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Salah satu tahapan dalam penatausahaan keuangan adalah tahap verifikasi terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban dan verifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan verifikasi juga merupakan tahap awal pengendalian intern instansi pemerintah sebagai *early warning* terhadap tindak penyalahgunaan anggaran belanja APBD. Verifikasi akan memastikan bukti-bukti lengkap dan sah yang mendukung keabsahan dari pertanggungjawaban kegiatan dan pengadaan barang jasa pemerintah.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang dan sebagainya. Verifikasi adalah salah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumen keuangan secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku[2]. Penelitian telah berkembang dengan menerapkan teknologi informasi di bidang verifikasi, inspeksi dan pengawasan; dalam industri transportasi, keuangan dan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem informasi e-verifikasi keuangan pemerintah daerah dengan metode pengembangan sistem *prototype*.

Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan[3]. Penerapan sistem informasi e-verifikasi merupakan suatu upaya untuk pemerintah daerah melakukan pengendalian internal atas masalah verifikasi anggaran kegiatan dan pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi yaitu; kesalahan input data, kesalahan penggunaan anggaran, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh kesalahan dalam input nomor rekening tagihan yang akan dibayarkan, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Contoh lainnya ketidaklengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh penyedia, hal ini menyebabkan proses pembayaran tidak dapat dilakukan.

Penelitian terkait pengawasan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari berbagai perspektif, antara lain:

Penelitian oleh[4], mengusulkan aplikasi yang berguna untuk mengelola proses inspeksi bus pada Terminal Bus Pulo Gebang. Aplikasi fokus pada pengembangan sistem inspeksi bus berbasis web.

Penelitian oleh[5], menyimpulkan bahwa penggunaan Software Jurnal (Software Akuntansi Online) dinilai dapat mempermudah akuntan dalam menginput data transaksi ke dalam sistem, di mana data transaksi tersebut dapat langsung di import ke dalam sistem sehingga lebih efisien, menghemat kertas dan keamanan data yang terjamin. Sedangkan penelitian oleh[6] menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih mudah sehingga dalam mengolah data keuangan, penganggaran memperoleh hasil yang strategis. Penelitian oleh[7] menyimpulkan bahwa Pengendalian yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut sudah sangat memadai, ditunjukkan dengan adanya pengendalian aplikasi yang menjamin bahwa masukan/input data keuangan dalam SIMDA Keuangan telah diotorisasi, divalidasi, dan dicek kelengkapannya untuk diproses dalam aplikasi SIMDA Keuangan

Penelitian selanjutnya oleh[8] menyimpulkan SPIP yang memiliki tingkat kelemahan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Semakin tinggi kelemahan SPIP, maka kualitas LKPD semakin rendah. Ketidapatuhan regulasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Penelitian oleh[9] juga menyimpulkan bahwa Lingkungan Pengendalian memiliki porsi pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Sedangkan menurut[10] SPI berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan dan penatausahaan aset tetap.

Penelitian diatas merupakan penelitian terkait yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Namun dari penelitian diatas belum ada yang membahas mengenai sistem pengendalian intern dari faktor kepatuhan penyelenggara pemerintah terhadap peraturan yang berlaku dalam hal penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah

Atas hal tersebut, penelitian ini menjabarkan serangkaian proses pengembangan sistem informasi e-verifikasi keuangan pemerintah daerah dengan metode SDLC (*System Development Life Cycle*) *Prototyping*. SDLC memiliki 4 (empat) tahapan dasar yaitu perencanaan, analisis, desain, dan implementasi, dimana kumpulan tahapan tersebut akan menggambarkan sebuah siklus pengembangan sistem[5]. Perencanaan dan analisis pengembangan sistem ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara terhadap pemerintah daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bogor dengan berfokus pada belanja kegiatan dan pengadaan barang. Desain dan implementasi sistem digambarkan dengan diagram UML yang merepresentasikan fungsional sistem, *object*, dan *user interface*.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari sistem verifikasi yang berjalan saat ini. Penulis melakukan *observasi* terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan objek verifikasi dan laporan-laporan yang dihasilkan dari proses verifikasi tersebut.

### 2.2. Analisis Data

Pengambilan data menggunakan lembar ceklist berdasarkan *observasi* yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data primer agar semua data yang diperlukan tidak ada yang terlewatkan. Selain itu, dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian ini seperti jurnal dan buku sebagai bahan rujukan dalam mencari, mengumpulkan, dan mempelajari informasi-informasi yang berkaitan dengan sistem e-verifikasi maupun pengelolaan keuangan daerah serta teori-teori yang mendukung pembuatan sistem informasi yang menerapkan teknologi *berbasis web*.

### 2.3. Metode Pembangunan Sistem

Sistem ini dibuat dengan menggunakan metodologi SDLC atau yang di kenal *dengan Software Development Life Cycle*. Salah satu model SLDC yang paling sering digunakan untuk menggambarkan proses dari pengembangan software adalah model *prototype*. Metode pengembangan sistem *prototype* adalah sebuah bentuk dalam melakukan tahap analisis, desain, dan implementasi secara bersamaan dan dilakukan berulang-ulang dalam satu siklus sampai sebuah sistem selesai. Metode *prototype* sangat tepat digunakan dalam sebuah *project* yang memiliki kriteria kebutuhan penggunaanya masih belum jelas dan memiliki waktu pengembangan yang sangat singkat. Penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan seperti Gambar 1.

Berikut ini penjelasan masing-masing tahapan penelitian :

#### 1. Observasi

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini dan kebutuhan sistem di masa yang akan datang.

#### 2. Pembangunan Sistem dan Pengumpulan Kebutuhan Sistem

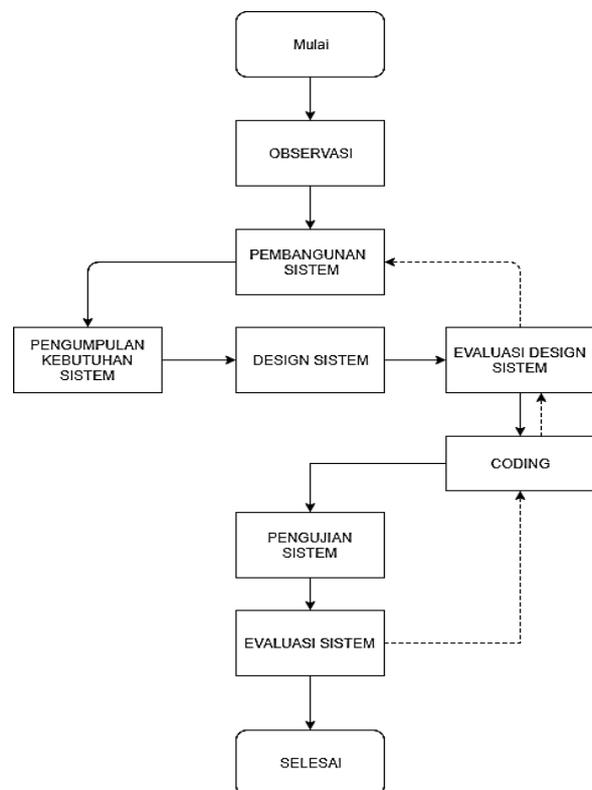
Tahap ini merupakan tahap dimulainya proses pembangunan sistem. Dimana setelah dilakukan *observasi*, tahapan selanjutnya mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap segala kendala, tujuan dan mendefinisikan apa yang diinginkan dari sistem. Dan dilakukan juga analisa proses bisnis dan mempelajari komponen-komponen yang dibutuhkan dalam merancang sistem.

#### 3. Design Sistem

Dalam tahap ini dibuat sebuah arsitektur sistem secara keseluruhan, menentukan alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma yang detail. Desain juga meliputi desain basis data, desain tampilan, dan desain sistem berdasarkan hasil analisa pada tahap pengumpulan kebutuhan sistem.

#### 4. Coding

Tahapan dimana keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang selanjutnya akan di integrasikan menjadi sistem yang lengkap untuk meyakinkan bahwa persyaratan perangkat lunak telah dipenuhi.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Sistem

#### 5. Pengujian dan Evaluasi Sistem

Seluruh modul-modul yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing modul. Setelah semua sistem terintegrasi selanjutnya diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Observasi

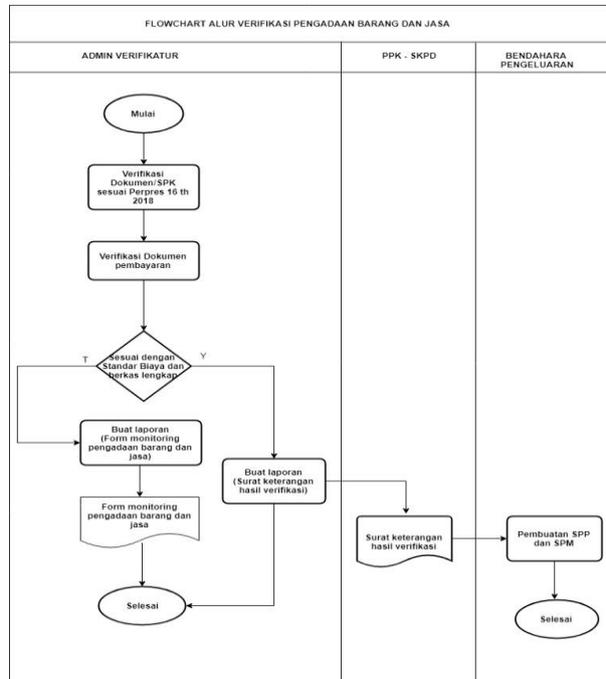
Proses bisnis sistem yang berjalan saat ini pada saat melaksanakan verifikasi kegiatan adalah pada saat verifikasi menerima surat pertanggungjawaban (SPJ), selanjutnya verifikasi melakukan pengecekan terhadap kode rekening yang diajukan pertanggungjawabannya apakah tersedia anggaran kasnya di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan. Jika anggaran kas tersedia tahap selanjutnya adalah meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pertanggungjawaban apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika sesuai langkah selanjutnya memverifikasi kesesuaian harga yang tertera pada surat pertanggungjawabab (SPJ) dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi langkah selanjutnya adalah verifikasi membuat surat keterangan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pencairan untuk disahkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD). Surat tersebut dijadikan dasar oleh Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas transaksi-transaksi keuangan. Proses bisnis tersebut dapat digambarkan melalui gambar *flowchart pada gambar 2*.



Gambar 2. Flowchart alur verifikasi kegiatan

Sedangkan proses bisnis verifikasi pengadaan barang dan jasa adalah verifikasi memeriksa kelengkapan dokumen Kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK). Setelah dokumen kontrak dinyatakan sesuai tahap selanjutnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Setelah semua dokumen lengkap dan memenuhi syarat, verifikasi akan membuat laporan

berupa surat keterangan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pencairan pengadaan barang dan jasa. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD untuk disahkan sebagai dasar bendahara pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Berikut adalah *flowchart* alur verifikasi pengadaan barang dan jasa :



Gambar 3. Flowchart alur verifikasi pengadaan barang dan jasa

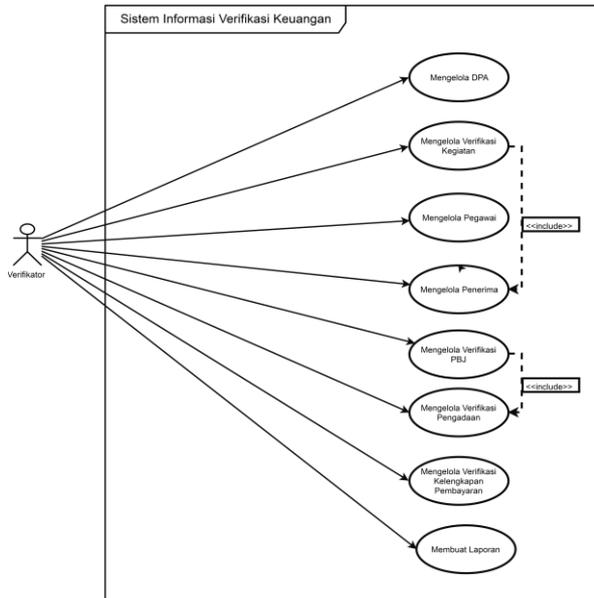
#### 3.2. Pengumpulan Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem informasi e-verifikasi ini terdiri atas beberapa fungsi utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain : *import* data DPA dan Anggaran Kas dari file .xls ke dalam sistem yang digunakan sebagai data awal verifikasi kegiatan; dapat menjalankan fungsi CRUD ( *Create, Read, Update* dan *Delete* ) di database MySQL yang ditampilkan di *web* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dapat meng-*export* laporan yang dihasilkan dalam bentuk .pdf maupun .xls.

#### 3.3. Design Sistem

Hasil pengembangan aplikasi sistem informasi verifikasi keuangan digambarkan dalam bentuk *Unified Modeling Language (UML)* dan *User Interface (UI) design*.

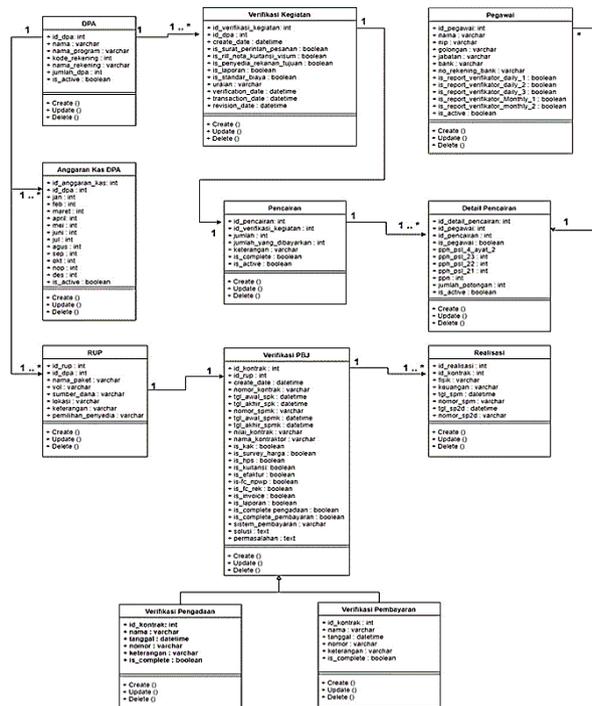
Pada *Use Case Diagram* menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan pengguna sistem dalam aplikasi, antara lain : mengelola DPA, mengelola verifikasi kegiatan, mengelola pegawai, mengelola penerima, mengelola kontrak, mengelola verifikasi pengadaan, mengelola verifikasi kelengkapan pembayaran dan mengelola laporan, seperti terlihat pada Gambar 4



Gambar 4. Use Case Diagram Aplikasi

Aktivitas mengelola DPA merupakan proses membuat, merubah dan menghapus DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) dan Anggaran Kas DPA yang dijadikan sebagai data master dari aktivitas verifikasi kegiatan. Aktivitas mengelola verifikasi kegiatan merupakan membuat, merubah dan menghapus data verifikasi kegiatan. Pada proses verifikasi kegiatan ini proses input data yang diperoleh dari surat pertanggungjawaban dilakukan dan diverifikasi apakah surat-surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas mengelola pegawai merupakan membuat, merubah dan menghapus data pegawai. Aktivitas mengelola penerima merupakan membuat, merubah dan menghapus data mengelola penerima. Pada proses mengelola penerima *include* dengan proses verifikasi kegiatan. Penerima yang ditambahkan, dirubah maupun dihapus harus berdasarkan surat pertanggungjawaban yang sudah diverifikasi. Aktivitas mengelola verifikasi PBJ merupakan membuat, merubah dan menghapus data verifikasi PBJ. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan data master dari tabel DPA dan tabel RUP. Aktivitas mengelola verifikasi pengadaan merupakan membuat, merubah dan menghapus data verifikasi pengadaan. Aktivitas ini *include* dengan aktivitas mengelola verifikasi PBJ, dimana pada aktivitas ini dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan. Aktivitas mengelola kelengkapan pembayaran merupakan membuat, merubah dan menghapus data pembayaran. Pada aktivitas ini dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen untuk proses pembayaran pengadaan barang dan jasa yang diperoleh melalui pihak penyedia. Aktivitas mengelola laporan merupakan membuat, merubah dan menghapus data laporan.

Berdasarkan aktivitas diatas maka diperlukan struktur data dan *class* pada aplikasi yang dapat dilihat pada Gambar 5.

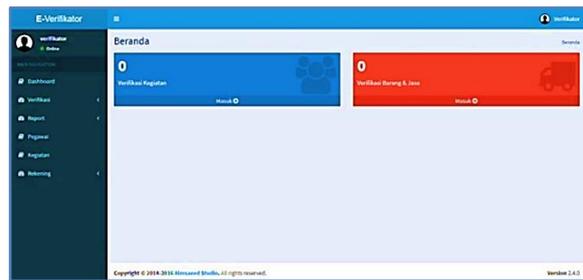


Gambar 5. Class Diagram Aplikasi

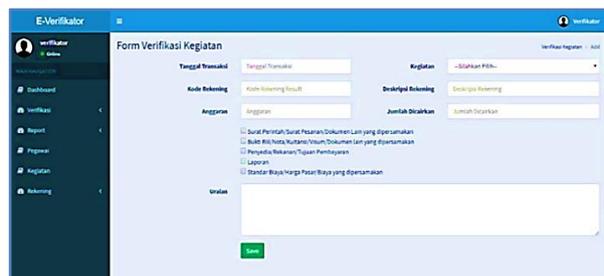
3.4. Coding

Perangkat lunak/ *software* yang dibutuhkan untuk membuat sistem informasi ini adalah menggunakan sistem operasi *windows*, database *MySQL*, bahasa pemrograman *PHP* dan teknologi *framework Cakephp*. Untuk menjalankan sistem ini dapat menggunakan *web browser Mozilla Firefox* maupun *Google Chrome*.

3.5. Pengujian dan Evaluasi Sistem



Gambar 6. Dashboard Aplikasi



Gambar 7. Gambar Form Verifikasi Kegiatan

Gambar 8. Gambar Form Tambah Penerima

Gambar 9. Gambar Form Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Gambar 6, 7, 8, dan 9 merupakan beberapa gambar mengenai hasil aplikasi sistem e-verifikasi keuangan yang diterapkan menggunakan *web browser*, dimana pada gambar 6 adalah halaman *dashboard*. Halaman ini merupakan halaman utama sistem e-verifikasi keuangan setelah kita berhasil *login*. Pada gambar 7 adalah halaman verifikasi kegiatan, dimana *user* dapat memulai melakukan aktifitas verifikasi kegiatan. Setelah melakukan *input* data verifikasi kegiatan, selanjutnya adalah menambah penerima sebagaimana terlihat pada gambar 8.

Gambar 9 adalah halaman verifikasi pengadaan barang dan jasa. Pada halaman ini *user* dapat memulai melakukan kegiatan verifikasi pengadaan barang dan jasa. Halaman verifikasi kegiatan dan verifikasi pengadaan barang dan jasa dapat diakses melalui menu verifikasi yang terdapat di halaman tengah *dashboard* maupun di daftar menu di halaman sisi kiri *dashboard* melalui modul verifikasi.

#### 4. Kesimpulan

Sistem informasi e-Verifikasi menjadikan salah satu jawaban terhadap proses penatausahaan keuangan daerah pada pelaksanaan verifikasi keuangan instansi Pemerintah. Sistem ini dapat menyajikan pelaksanaan verifikasi kegiatan dan verifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah secara cepat, tepat dan

transparan sesuai dengan kaidah. Yaitu melalui pengontrolan input kode rekening anggaran, penggunaan anggaran dan kontrol terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan secara elektronik. Sistem informasi e-Verifikasi juga mampu menyediakan layanan pengelolaan DPA, mengelola verifikasi kegiatan, mengelola pegawai, mengelola penerima, mengelola verifikasi PBJ, mengelola verifikasi pengadaan, mengelola pembayaran dan mengelola laporan sehingga pelaksanaan tugas verifikasi keuangan daerah menjadi lebih sistematis, tepat dan transparan.

Adapun saran yang perlu ditambahkan untuk aplikasi berikutnya adalah :

- 1) Meningkatkan desain tampilan sehingga lebih menarik.
- 2) Mengembangkan aplikasi menjadi terintegrasi setingkat Pemerintah Daerah sehingga semua Perangkat Daerah bisa menggunakan sistem ini untuk pengawasan internal.
- 3) Menambah fitur *e-consultant* kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)..

#### Daftar Rujukan

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. 2003.
- [2] D. Suharso, Drs., Anan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. 2005.
- [3] P. R. Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 2018.
- [4] F. Masya, F. I. Komputer, U. M. Buana, F. I. Komputer, and U. M. Buana, "( JUSS ) Jurnal Sains dan Sistem Informasi ISSN 2614-8277 Aplikasi Sistem Inspeksi Bus Berbasis Web Pada Terminal Bus," vol. 1, no. 2, pp. 23–33, 2018.
- [5] U. Rahardja, Q. Aini, M. Hardini, S. Jurnal, L. Keuangan, and S. Online, "Penerapan Software Akuntansi Online Sebagai Penunjang Pencatatan Laporan Keuangan Implementation of Online Accounting Software As Supporting Of Financial Statement," pp. 176–187, 1978.
- [6] S. Watulingas, Patricia;Tangkuman, "IPTEKS Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *IPTEKS Apl. Sist. Inf. Manaj. Drh. Keuang. Pada Badan Perenc. Dan Pembang. Drh. Provinsi Sulawesi Utara*, vol. 02, 2018.
- [7] Y. W. A. Harmadhani Adi Nugraha, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)," *Anal. Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolah. Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)*.

- [8] A. Sunarti;Eddy Sarwono, “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Ketidakpatuhan Regulasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” vol. 19, 2018.
- [9] T. Herawati, “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur),” vol. 11, 2014.
- [10] E. D. Trisnani and H. Paramu, “Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap,” vol. 11, no. 3, pp. 271–282, 2017.